

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh :

DWI HARYONO

NPM	:	03 05 08558
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh :

DWI HARYONO

NPM : 03 05 08558
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**Fakultas Hukum
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh:

DWI HARYONO

NPM

: 03 05 08558

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 November 2007

Dosen Pembimbing,

G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Desember 2007
Tempat : Ruang Dosen (Anny Retnowati, SH., M.Hum.)

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua	:	G. Aryadi, SH., M.H.
Sekretaris	:	Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.
Anggota	:	Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

B. Hestu Cipto H., SH. M.Hum

Motto

“Jadikan kegagalan sebagai guru berharga dalam hidup”

“Selalu ada jalan bagi yang mau berusaha”



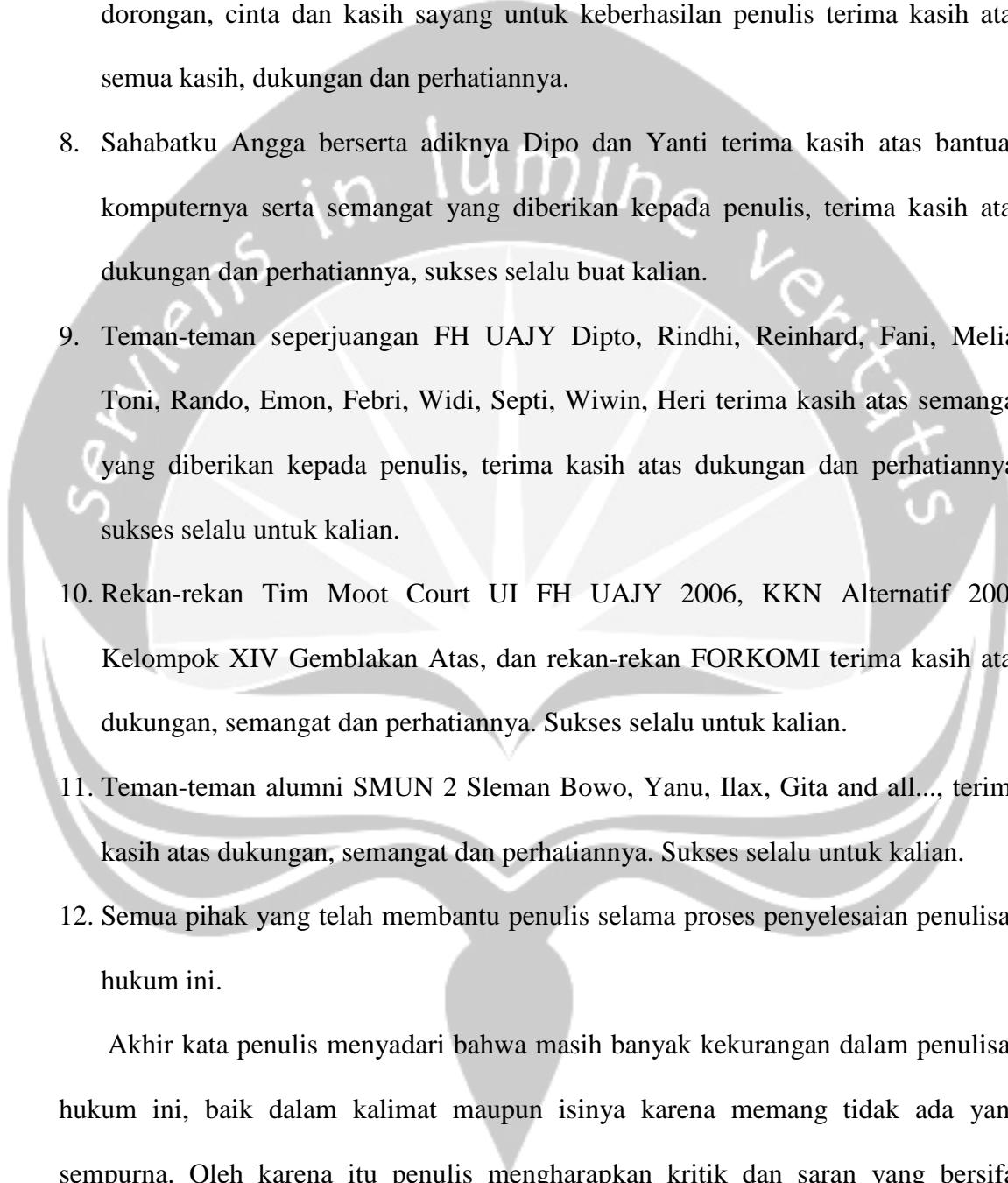
KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak B. Hestu Cipto H., SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, SH., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Kepala BAPEDA Propinsi DIY atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis.
5. Walikota Yogyakarta dan Kepala Dinas Perizinan Kota atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Sudarwati, SH selaku jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta atas kesediaannya memberikan penjelasan kepada penulis.

- 
7. Kedua orang tuaku tercinta serta kakakku yang telah memberikan semangat serta dorongan, cinta dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis terima kasih atas semua kasih, dukungan dan perhatiannya.
 8. Sahabatku Angga berserta adiknya Dipo dan Yanti terima kasih atas bantuan komputernya serta semangat yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya, sukses selalu buat kalian.
 9. Teman-teman seperjuangan FH UAJY Dipto, Rindhi, Reinhard, Fani, Melia, Toni, Rando, Emon, Febri, Widi, Septi, Wiwin, Heri terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya, sukses selalu untuk kalian.
 10. Rekan-rekan Tim Moot Court UI FH UAJY 2006, KKN Alternatif 2007 Kelompok XIV Gemblakan Atas, dan rekan-rekan FORKOMI terima kasih atas dukungan, semangat dan perhatiannya. Sukses selalu untuk kalian.
 11. Teman-teman alumni SMUN 2 Sleman Bowo, Yanu, Ilax, Gita and all..., terima kasih atas dukungan, semangat dan perhatiannya. Sukses selalu untuk kalian.
 12. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum

ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya penulis , bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2007

Yang menyatakan

DWI HARYONO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Pernyataan Keaslian	viii
Daftar Isi	ix
Abstract	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Konsep.....	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II: ARTI PENTING SURAT DAKWAAN DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan	13
a. Pengertian Surat Dakwaan	13
b. Syarat – Syarat Surat Dakwaan Menurut Undang – Undang .	15
c. Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	24
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	24
b. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang – undangan di Indonesia	28

c.	Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	37
C.	Surat Dakwaan Sebagai Upaya Pengendalian Tindak Pidana Korupsi	40
a.	Proses Penyusunan Surat Dakwaan dalam Tindak Pidana Korupsi	40
b.	Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Dalam Menyusun Surat Dakwaan	46
BAB III: PENUTUP		
A.	Kesimpulan	48
B.	Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

THE ARRANGEMENT OF LETTER OF ACCUSATION AS THE EFFORT OF CONTROLLING CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION

This legal research would like to response the case on how the letter of accusation should be arranged in order the accused of criminal action of corruption is not set free and what the barriers will be faced by the accusatory in arranging the letter of accusation. The purpose of this research was to gain the data on the process of arrangement of letter of accusation in order the accused of criminal action of corruption is not set free and also to gain the data on what the barriers will be faced by the accusatory in arranging the letter of accusation. Method of research which used by the author is normative legal research supported with the result of field research i.e. by holding interview to the source person. The result of this field research showed that the letter of accusation is more appropriate if it is arranged by using form of folded letter of accusation in order the accused of criminal action of corruption could be controlled. The barriers which are faced by the accusatory in arranging the letter of accusation are the different technical capability of professionalism by one accusatory to the order which result in the enharmonic cooperation and the uncompleted result of investigation. The recommendation from the author is to build the good appropriate between the team of accusatory by the investigator in handling the criminal action of corruption and give the training toward the general accusatory on the arrangement of letter of accusation in criminal action of corruption.

Keywords: letter of accusation, criminal, corruption